



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 – 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH 73112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan- Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil disusun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah telah merespon UU tersebut dengan menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021.

Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicators*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, diharapkan, Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan bagi semua stakeholder Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Palangka Raya, 02 Oktober 2017

KEPALA DINAS,

Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19631207 199102 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah kurun waktu 2010 - 2015	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	47
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	54
3.4. Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	61
3.6. Isu-isu Strategis.....	62
BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	64
4.1. Visi dan Misi.....	64
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	66
4.3. Strategi.....	75
4.4. Kebijakan	76
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	855
5.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	855
5.2. Indikator Kinerja	866
5.3. Kelompok Sasaran	99
5.4. Pendanaan Indikatif.....	100
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	145
BAB VII PENUTUP.....	14947

DAFTAR TABEL

BAB II		
2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	23
2.2	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan	23
2.3	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan	23
2.4	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	24
2.5	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan	24
2.6	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia	25
2.7	Daftar Perlengkapan Penunjang	26
2.8	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas P3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 -2015	27
2.9	Rekapitulasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, belanja modal Dinas P3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 -2015	28
2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah	29
2.11	Daftar P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah	35
2.12	Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	36
2.13	Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	36
2.14	Daftar Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota dan Pemakaian Alat Kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015	37
2.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas P3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 -2015	40
2.16	Pemetaan SWOT	45
BAB III		
3.1	Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57
3.2	Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59
3.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019	62
BAB IV		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	69
4.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra SKPD Dinas P3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah	79
BAB V		
5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah	101
5.2	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Sasaran	143
BAB VI		
6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	145

DAFTAR GAMBAR

BAB II		
2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	22
2.2	Pencapaian IPG menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2013-2014	31
2.3	Pencapaian IPG menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2013-2014	32
2.4	Pencapaian IDG Kalimantan Tengah 2011-2013	33
2.5	Pencapaian IDG Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2013-2014	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021. Penyusunan Dokumen Renstra sangat terkait dengan Visi, Misi Gubernur dalam RPJMD. Rencana Strategi DP3APP-KB disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Fungsi Rencana Strategis DP3APP-KB disusun untuk menjawab pertanyaan : kemana pelayanan DP3APP-KB akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan oleh DP3APP-KB agar tujuan tercapai. Rencana Strategi juga berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Gubernur dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas DP3APP-KB serta tolok ukur pencapaiannya.

dokumen rencana strategis DP3APP-KB diharapkan mampu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis DP3APP-KB yang dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif di DP3APP-KB yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu DP3APP-KB untuk menemukan dan mendefinisikan kembali masalah utama (isu kritis) yang dihadapi DP3APP-KB terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan. Oleh karena itu rencana strategis DP3APP-KB menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. baik formula maupun proses penyusunan Renstra SKPD benar-benar mampu mendukung visi, misi dan program Gubernur dan RPJMD dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum yang bisa dijadikan pijakan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 22 ayat 5 disebutkan bahwa Perempuan urusan Pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Terdiri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
28. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
29. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
30. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
36. Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
37. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder DP3APP-KB dan seluruh aparatur di DP3APP-KB dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta memberikan arahan dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja atau mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan serta sebagai dasar penyusunan rencana kinerja dan rencana kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, disertai dengan harapan bahwa Renstra ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebagai gambaran tentang kondisi saat ini DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah adalah, sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;

8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Susunan Organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian perangkat penyelenggara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender ;
2. Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak;
5. Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR) ;
7. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
8. Penguatan kelembagaan Keluarga Kecil berkualitas ;
9. Penetapan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ;
10. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga ;
11. Pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan; dan
12. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan aset serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian sekretariat dalam melaksanakan kegiatan teknis administrasi umum, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, dan kegiatan serta laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan anggaran/RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

5. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
6. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan, arsip dan aset ;
7. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program dan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

3. Bidang

A. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kajian dan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
2. Memfasilitasi pembentukan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
3. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
5. Menyiapan rumusan kebijakan teknis pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan serta Pemberdayaan Perempuan;
6. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
7. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

8. Fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
9. Melakukan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
11. Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.
12. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data sebagai pusat data;
13. Memberikan tugas kepada bawahan pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai petunjuk yang telah diberikan atasan;
14. Memberikan penilaian atas prestasi kinerja bawahan pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan baik dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas :

a. Seksi Pelembagaan PUG

Seksi Pelembagaan PUG mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Pelembagaan PUG

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tentang pemberdayaan perempuan

c. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan

B. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
3. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
5. Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
8. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov);

9. Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan partisipasi masyarakat;
10. Menilai kinerja Seksi Data, Seksi Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat;
11. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada Seksi Data, Seksi Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat;
12. Membuat laporan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :

a. Seksi Data

Seksi Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang data

b. Seksi Penyebarluasan Informasi

Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang penyebaran informasi

c. Seksi Partisipasi Masyarakat

Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang partisipasi masyarakat

C. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pematapan lembaga layanan anak;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pematapan lembaga layanan anak;

3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
5. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
7. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
8. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
9. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
10. Membuat pelaporan secara periodik baik internal maupun ke pihak lainnya;
11. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data sebagai pusat data.
12. Membuat laporan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

a. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang tumbuh kembang anak

b. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak

c. Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan Lembaga Layanan Anak

D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
4. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
6. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

a. Seksi Perlindungan Perempuan

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang perlindungan perempuan

b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup keluarga

c. Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
5. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
7. Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
8. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
9. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi;
11. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;
12. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan,

perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang pengendalian penduduk

b. Seksi Keluarga Sejahtera

Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang keluarga sejahtera.

c. Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang keluarga berencana.

4. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan tindak kekerasan;
2. Melakukan pelayanan dan operasional P2TP2A;
3. Monitoring dan evaluasi;
4. Mengumpulkan, menyajikan dan mengolah data kasus.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data

b. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas memberikan fasilitas dan pelayanan konsultasi kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan serta penanganan secara menyeluruh

c. Seksi Pengendalian Mutu, Data dan Informasi

Seksi Pengendalian Mutu, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian tentang mutu, data dan informasi pada kegiatan yang dilakukan dalam penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Jabatan fungsional Tertentu

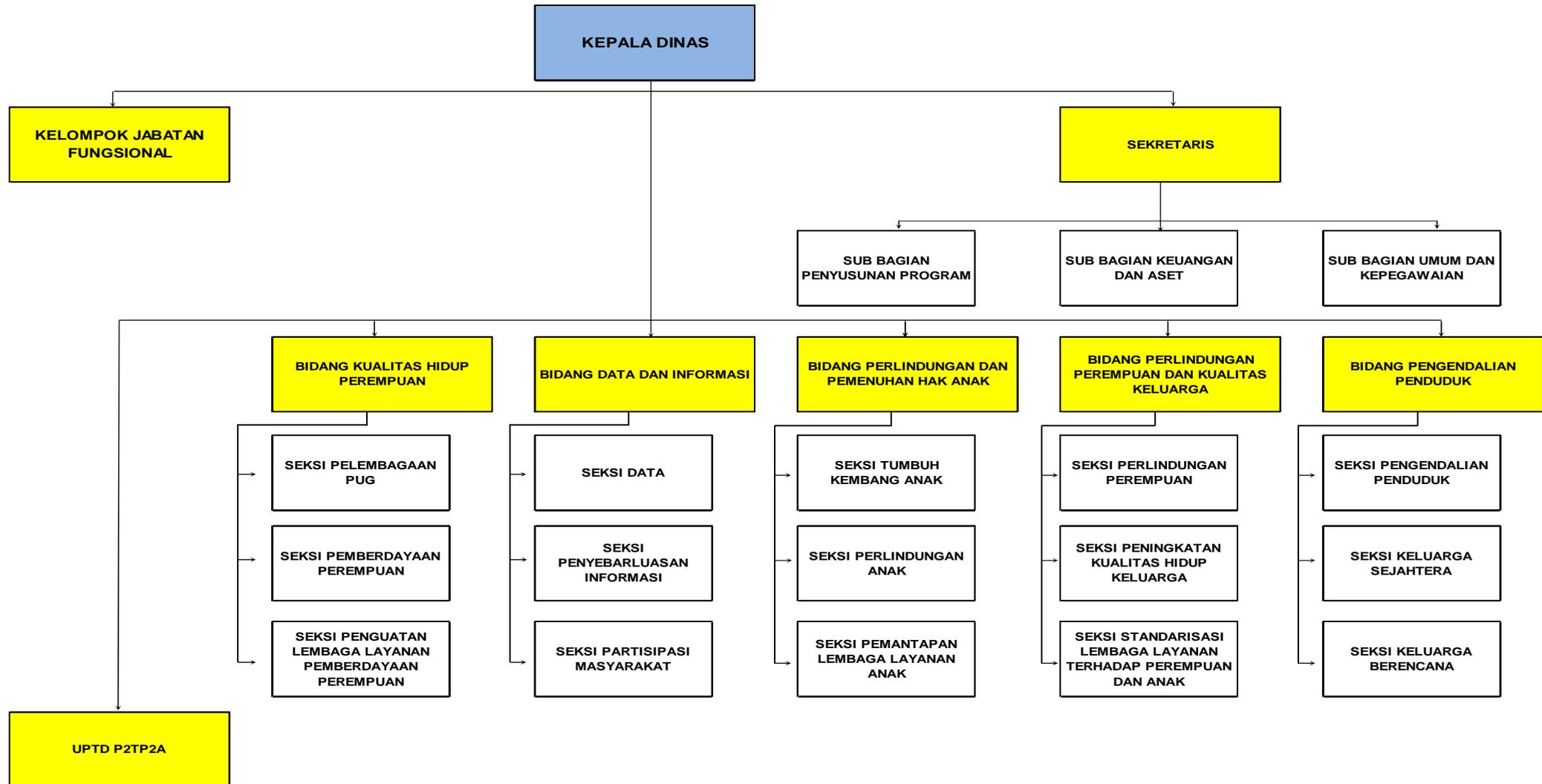
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jabatan Fungsional Umum

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindehan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

1. Sumberdaya Manusia

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai disajikan terpilah laki-laki dan perempuan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	20	40	60
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	10	8	18
Jumlah		30	48	78

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	8	12
2.	Golongan III	12	26	38
3.	Golongan II	2	6	8
4.	Golongan I	2	-	2
Jumlah		20	40	60

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Golongan	Jumlah		Total	Total
		L	P		
1.	SDN	-	-	-	17
2.	SLTP	2	-	2	
3.	SLTA	4	11	15	
4.	Sarjana Muda / D3	1	5	6	37
5.	Sarjana S1	10	21	31	
6.	Pasca sarjana S2	3	3	6	6
Jumlah		20	40	60	60

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS di lingkungan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karier, namun yang perlu diingat bahwa dalam prinsip manajemen organisasi yang baik adalah tingkatan *low mangement* komposisinya harus lebih banyak daripada tingkat *middle mangement* . Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	1	5	6
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	18	9	9	18
4.	Fungsional Tertentu / Arsiparis	Esselon V	1	-	1	1
Jumlah			26	10	16	26

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	12
2.	Pembina Tk. I	IV / b	1	7	8	
3.	Pembina	IV / a	3	1	4	
4.	Penata Tk. I	III / d	7	9	16	38
5.	Penata	III / c	-	4	6	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	3	10	13	
7.	Penata Muda	III / a	2	3	5	
8.	Pengatur Tk. I	II / d	-	5	5	8
9.	Pengatur	II / c	2	-	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	-	-	
11.	Pengatur muda	II / a	-	1	1	
12.	Juru	I / c	2	-	2	2
Jumlah			20	40	60	60

Komposisi jumlah PNS DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 60 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, ternyata terjadi penggelembungan piramida di level *middle mangement* atau level PNS pada Golongan III sebanyak 38 orang atau sebesar 63,33 %, sedangkan pada level *low mangement* atau PNS pada Golongan II dan golongan I sebanyak 8 orang atau sebesar 16,67 %, artinya di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bisa dikatakan ideal. Dari kondisi tersebut di atas, kondisi idealnya dari PNS yang ada di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah Tengah pada level *top*

management atau Gol. IV sebesar 25 % atau sebanyak 15 orang, untuk Golongan III pada Level *middle management* sebesar 30 % atau sebanyak 18 orang, sedangkan pada Level *low management* atau PNS Golongan II dan I sebesar 45 % atau sebanyak 27 orang.

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2015				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	-	-	3	5	3	5	Produktif
2.	30 – 39 Tahun	8	13,3	7	11,7	15	25	(30 %)
3.	40 – 49 Tahun	4	6,7	6	10	10	16,7	Umum
4.	≥ 50 tahun	8	13,3	24	40	32	53,3	Kurang Produktif (53,3 %)
Jumlah		20	33,3	40	66,7	60		100

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah tergolong minim atau sebesar 30 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 53,3 % dan sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 4 orang atau 6,7 %, sehingga perlu untuk mempersiapkan permohonan pengadaan formasi CPNS baru di DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 50 % atau sebanyak 30 orang. Kondisi riil jumlah PNS dalam usia produktif sebanyak 18 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 30 % atau sebanyak 18 orang. Kondisi riil jumlah PNS pada kisaran umur tersebut sebanyak 10 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 20 % atau sebanyak 12 orang. Kondisi riil jumlah PNS di atas 50 tahun sebanyak 32 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Daftar Perlengkapan Penunjang

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak	
I.	Alat Angkutan				
1.	Kendaraan roda 4	1 Buah	√		
2.	Kendaraan roda 2	8 Buah	√		
II.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
a.	Perlengkapan Kantor				
1.	Mesin Ketik	4 Buah	√		
2.	Lemari Besi	18 Buah	√		
3.	Filling Kabinet	11 Buah	√		
4.	Brankas	1 Buah	√		
5.	Papan Pengumuman	1 Buah	√		
6.	Struktur Organisasi	1 Buah	√		
7.	Papan absen	1 Buah	√		
8.	Kipas angin	11 Buah	√		
9.	AC 2 PK	2 Buah	√		
10.	Kulkas	1 Buah	√		
11.	Jam dinding	1 Buah	√		
b.	Komputer				
1.	Desktop PC	12 unit	√		
2.	Notebook PC	12 unit	√		
3.	Printer A4	12 unit	√		
4.	Printer A3	2 unit	√		
c.	Meubelair				
1.	Lemari Kayu	5 Buah	√		
2.	Kursi Rapat	62 Buah	√		
3.	Meja kayu	1 Buah	√		
4.	Meja Rapat	1 Set	√		
5.	Kursi Tamu	1 Set	√		
6.	Meja resepsionis	1 Set	√		
7.	Meja komputer	1 Set	√		
8.	Meja Kerja	56 Buah	√		
9.	Kursi kerja	90 Buah	√		
d.	Alat-alat Studio				
1.	Lcd Viewer + Layar Projektor	1 Unit	√		
2.	Handycam	1 Buah	√		
3.	Kamera DSLR	1 Buah	√		
4.	Sound System	1 Unit	√		
5.	Portable Wireless Amplifier	1 Unit	√		
6.	TV	1 Buah	√		
e.	Alat-alat komunikasi				
1.	Telephone	1 Unit	√		
2.	Modem adsl	2 Buah	√		

3. Keuangan

a. Sumber Dana APBD 2011 s/d 2015

dalam hal anggaran DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa tahapan proses dari perencanaan sampai kepada penetapan anggaran untuk dapat mengakomodir kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terutama pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah perkembangan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung terakumulasi didalamnya.

Tabel 2.8
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 -2015

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	7.494.152.468,-	7.026.302.453,-	93,76
2012	9.236.316.818,-	7.086.812.446,-	76,73
2013	10.244.981.462,-	9.279.615.852,-	90,58
2014	12.202.071.132,-	11.822.816.018,-	96,89
2015	12.914.078.438,-	12.533.015.806,-	97,05
Total	51.850.572.726,-	47.748.562.575,-	92,09

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pemerintah dalam mendukung Program dan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana setiap tahun dana yang dialokasikan selalu meningkat. Tidak lepas dari paradigma pemerintah terkait realisasi yang menuntut terserapnya anggaran secara optimal guna menunjukkan tingkat kematangan perencanaan penganggaran ditingkat SKPD serta efektifitas penggunaan anggaran pemerintah guna memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan SKPD, DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha agar tingkat peningkatan anggaran dan realisasinya berbanding lurus dengan kualitas kinerja SKPD yang diharapkan meningkat tanpa mengesampingkan isu dan permasalahan di daerah terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta metode-metode pencapaian indikator-indikator yang efektif, tepat guna serta tepat sasaran.

Tabel 2.9

**Rekapitulasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 -2015**

JENIS BELANJA	2011	2012	2013	2014	2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.404.774.202	3.367.088.037	3.489.313.922	3.897.054.866	4.875.019.783
BELANJA LANGSUNG	3.621.528.251	3.719.724.409	5.790.301.930	7.925.760.952	7.657.996.023
Belanja Pegawai	716.660.300	376.998.000	161.085.000	506.475.000	293.157.350
Belanja Barang dan Jasa	2.480.366.151	2.643.694.969	4.544.241.310	6.376.700.622	6.097.354.041
Belanja Modal	424.501.800	699.031.440	1.084.975.620	1.042.585.330	1.267.484.632
JUMLAH	7.026.302.453	7.086.812.446	9.279.615.852	11.822.815.818	12.533.015.806

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011 – 2015

No.	Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.552.796.568	5.181.316.818	4.115.981.462	3.944.767.552	5.028.078.438	3.404.774.202	3.367.088.037	3.489.313.922	3.897.054.866	4.875.019.783	95,83	64,99	84,77	98,79	96,96	1.475.281.870	1.470.245.581
II	BELANJA LANGSUNG	3.941.356.400	4.055.000.000	6.129.000.000	8.257.303.580	7.886.000.000	3.621.528.251	3.719.724.409	5.790.301.930	7.925.761.152	7.657.996.023	91,89	91,73	94,47	95,98	97,11	3.944.643.600	4.036.467.772
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	737.108.100	756.859.000	1.202.537.620	1.611.625.652	1.657.825.556	645.354.575	703.613.931	1.175.900.594	1.516.809.941	1.607.859.416	87,55	92,96	97,78	94,12	96,99	920.717.456	962.504.841
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	712.600.800	350.000.000	326.737.380	325.250.000	230.976.704	696.084.400	330.301.848	313.199.000	324.220.000	229.340.000	97,68	94,37	95,86	99,68	99,29	(481.624.096)	(466.744.400)
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	49.000.000	85.975.000	70.000.000	108.000.000	154.547.740	48.837.500	74.843.000	57.356.200	107.793.000	154.120.000	99,67	87,05	81,94	99,81	99,72	105.547.740	105.282.500
4	PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS PNS	110.000.000	150.000.000	-	-	-	110.000.000	142.125.000	-	-	-	100,00	94,75	0,00	0,00	0,00	(110.000.000)	(110.000.000)
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	140.000.000	70.000.000	50.000.000	118.000.000	118.000.000	85.955.300	52.792.000	49.987.700	117.695.307	111.429.500	61,40	75,42	99,98	99,74	94,43	(22.000.000)	25.474.200
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	94.570.000	69.120.000	140.000.000	110.000.000	110.000.000	92.343.100	62.494.700	138.902.000	109.998.100	109.987.500	97,65	90,41	99,22	100,00	99,99	15.430.000	17.644.400
7	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	145.321.900	145.321.000	165.500.000	250.000.000	250.000.000	142.706.400	139.380.400	164.185.400	247.217.800	243.768.700	98,20	95,91	99,21	98,89	97,51	104.678.100	101.062.300
8	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	904.640.800	1.304.045.000	1.954.200.000	2.164.907.808	2.049.000.000	804.968.676	1.140.674.895	1.718.898.861	2.103.856.995	1.953.197.700	88,98	87,47	87,96	97,18	95,32	1.144.359.200	1.148.229.024
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	297.576.000	287.500.000	933.500.000	1.200.290.000	1.424.000.000	284.740.800	284.073.350	901.394.875	1.058.881.585	1.381.660.107	95,69	98,81	96,56	88,22	97,03	1.126.424.000	1.096.919.307
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER DALAM PEMBANGUNAN	34.000.000	54.000.000	60.000.000	60.000.000	100.000.000	34.000.000	53.955.000	59.860.000	60.000.000	100.000.000	100,00	99,92	99,77	100,00	100,00	66.000.000	66.000.000

11	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	303.333.800	297.370.500	555.875.000	846.634.070	596.000.000	300.247.200	290.973.000	550.537.150	836.047.490	587.778.400	98,98	97,85	99,04	98,75	98,62	292.666.200	287.531.200
12	PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL LEMBAGA	141.705.000	30.000.000	105.000.000	655.000.000	350.000.000	138.382.250	29.856.150	102.697.700	650.898.550	349.657.450	97,66	99,52	97,81	99,37	99,90	208.295.000	211.275.200
13	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	234.000.000	105.000.000	141.000.000	318.000.000	343.000.000	208.752.400	104.959.035	138.273.500	312.043.234	335.588.850	89,21	99,96	98,07	98,13	97,84	109.000.000	126.836.450
14	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	-	30.000.000	-	-	-	-	29.950.000	-	-	-	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	-	-
15	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	27.500.000	50.000.000	-	-	-	19.170.000	49.084.300	-	-	-	69,71	98,17	0,00	0,00	0,00	(27.500.000)	(19.170.000)
16	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DIMASYARAKAT	-	187.809.500	140.000.000	466.946.050	480.000.000	-	155.827.800	138.164.950	457.649.150	470.958.400	0,00	82,97	98,69	98,01	98,12	480.000.000	470.958.400
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PEKAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	-	-	187.000.000	-	-	-	-	183.364.000	-	-	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	-	-
18	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	-	72.000.000	75.000.000	-	-	-	68.720.000	74.930.000	-	-	0,00	95,44	99,91	0,00	0,00	-	-
19	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH	10.000.000	10.000.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000	9.985.650	6.100.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000	99,86	61,00	100,00	100,00	100,00	12.650.000	12.664.350
	TOTAL BL+BTL	7.494.152.968	9.236.316.818	10.244.981.462	12.202.071.132	12.914.078.438	7.026.302.453	7.086.812.446	9.279.615.852	11.822.816.018	12.533.015.806	93,76	76,73	90,58	96,89	97,05	5.419.925.470	5.506.713.353

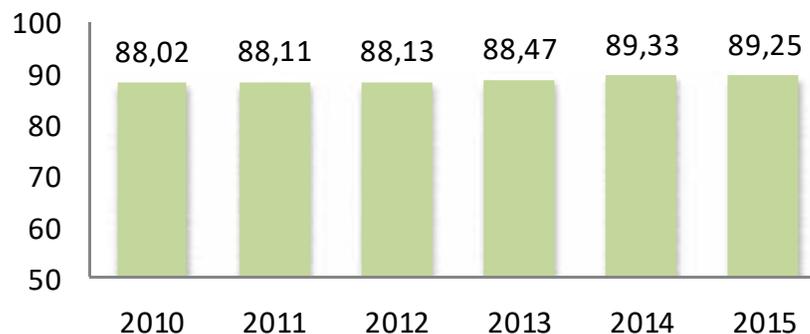
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah kurun waktu 2010 - 2015

1. Pencapaian Pembangunan Gender (IPG)

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang dicapai melalui program-program pembangunan.

Gambar 2.2

Pencapaian IPG Kalimantan Tengah 2010-2015



Salah satu tujuan dari pembangunan di Kalimantan Tengah adalah adanya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kalimantan Tengah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan tujuan tersebut mampu diwujudkan secara berkesinambungan. Namun demikian, kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota belum sepenuhnya bisa dihindari. Katingan dan Murung Raya merupakan kabupaten dengan nilai IPG 2015 terendah dengan capaian 84,78 dan 82,31 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah seperti yang terlihat pada Gambar dibawah

Gambar 2.3
Pencapaian IPG menurut Kabupaten/Kota
di Kalimantan Tengah, 2010-2015

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	84,75	85,39	86,63	86,87	90,04	90,04
2	Kotawaringin Timur	81,9	81,98	82,08	82,09	86,07	86,79
3	Kapuas	92,92	93,49	94,51	95,04	95,36	95,65
4	Barito Selatan	92,09	92,77	92,95	93,21	93,46	93,34
5	Barito Utara	81,73	82,02	84,83	85,22	85,5	85,62
6	Sukamara	85,95	86,55	87,91	89,61	90,14	90,09
7	Lamandau	89,66	90,33	90,74	90,87	91,06	91,55
8	Seruyan	87,83	87,93	88,13	88,13	88,87	88,42
9	Katingan	81,48	83,41	83,61	83,86	83,88	84,78
10	Pulang Pisau	85,46	85,89	86,83	88,73	90,27	90,25
11	Gunung Mas	81,57	84,9	88,16	90,99	91,8	92
12	Barito Timur	86,37	86,5	86,79	87,38	87,75	88,16
13	Murung Raya	79,86	80,46	80,97	80,99	81,53	82,31
14	Kota Palangka Raya	91,94	92,84	93,22	93,56	93,8	94,3
15	KALIMANTAN TENGAH	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25
	Nasional		89,52	90,07	90,19	90,34	91,03

Padahal kabupaten tersebut mempunyai potensi sumberdaya alam yang masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan tersebut antara lain adalah kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis yang relatif masih sulit merupakan masalah utama bagi pengembangan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah.

2. Pencapaian Pemberdayaan Gender (IDG)

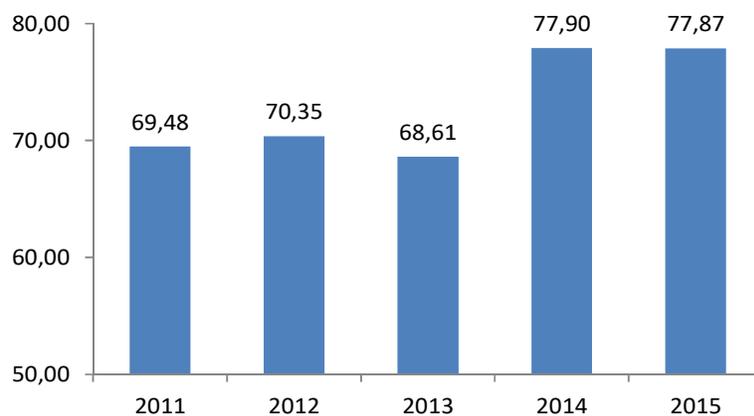
Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan dibidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.

Pencapaian Pemberdayaan Gender, unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran IDG. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses

pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi. Gambar 2.4 menggambarkan tren IDG Kalimantan Tengah sejak tahun 2011-2015 yang terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, IDG Kalimantan Tengah sebesar 69,48 meningkat menjadi 70,35 pada tahun 2012. Namun pada angka ini mengalami penurunan menjadi 68,61 pada tahun 2013 dan kemudian meningkat lagi menjadi 77,90 pada tahun 2014 dan 77,87 pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender meskipun masih terdapat dinamika yang menunjukkan penurunan capaian. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, perlu dikaji setiap komponen IDG secara lebih mendalam.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis; dan 3) sumbangan pendapatan.

Gambar 2.4
Pencapaian IDG Kalimantan Tengah 2011-2015



Pembangunan nasional yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan meraih pertumbuhan setinggi-tingginya, namun juga memperhatikan pemerataan antar wilayah. Hal ini sering disebut sebagai *growth with equity*, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Dengan demikian, kajian-kajian maupun pengukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan diharapkan senantiasa menyajikan perbandingan antar wilayah, baik pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa. Dengan

demikian, apabila ditemukan adanya kesenjangan yang besar antar wilayah, maka pemerintah dapat dengan segera melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat.

Namun hingga saat ini, apabila berbicara dikotomi pembangunan antara wilayah kabupaten/kota masih ditemukan adanya kesenjangan yang relatif cukup besar. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di wilayah kabupaten/kota adalah terkait dengan kondisi alam yang cukup berat dan kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah pedalaman, sehingga masih terdapat daerah-daerah yang terisolir (BPS, 2001). Keteringgalan ini juga berdampak pada kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah kabupaten/kota, yang masih menjadi catatan pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan tengah dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.5
Pencapaian IDG Menurut Kabupaten/Kota
di Kalimantan Tengah 2011-2015

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
		2011	2012	2013	2014	2015
7	Lamandau	49,31	50,45	51,76	54,65	53,55
9	Katingan	64,16	64,71	69,48	62,33	60,79
6	Sukamara	58,55	59,58	63,32	60,27	61,24
1	Kotawaringin Barat	58,96	60,92	60,75	64,48	63,98
13	Murung Raya	58,71	59,15	59,9	65,16	65,82
3	Kapuas	55,99	58,94	61,9	62,46	68,21
10	Pulang Pisau	67,22	66,51	68,44	69,38	69,32
8	Seruyan	63,33	62,32	64,71	69,47	69,7
2	Kotawaringin Timur	60,82	60,27	61,34	69,91	70,23
12	Barito Timur	65,23	66,16	65,7	66,01	75,8
14	Kota Palangka Raya	62,39	63,35	67,51	79,59	79,83
11	Gunung Mas	83,08	81,58	78,29	81,01	79,98
4	Barito Selatan	76,98	76,95	77,43	84,02	83,88
5	Barito Utara	78,56	78,91	76,18	83,51	84,35
15	Provinsi Kalimantan	69,48	70,35	68,61	77,9	77,87
	Nasional	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83

Pada tahun 2014 dan 2015 hanya terdapat 4 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IDG di atas rata-rata provinsi. Jumlah ini naik dibanding tahun 2013 yang tercatat sebanyak 3 kabupaten/kota. Keempat kabupaten/kota dengan capaian IDG di atas rata-rata provinsi tersebut adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara. Sementara kabupaten dengan IDG terendah tahun 2015 adalah Kabupaten Lamandau.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis; dan 3) sumbangan pendapatan. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (riil) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang melapor, ditangani, dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Dalam rangka akselerasi terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maka telah terbentuk P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah terbentuk di 14 Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.11
Daftar P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten / Kota	Dasar Pembentukan
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 188.44/139/2014
2.	Kota Palangka Raya	Nomor : 54 TAHUN 2013
3.	Kabupaten Barito Utara	Nomor : 188.45/427/2012
4.	Kabupaten Barito Selatan	Nomor : 260 TAHUN 2015
5.	Kabupaten Murung Raya	Nomor : 188.45/412.a/ Tahun 2013
6.	Kabupaten Barito Timur	Nomor : 448 TAHUN 2013
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Nomor : 476/18.B/BPPKB/VII/2012
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Nomor : 188.45/539/HUK-BPPKB/2013
9.	Kabupaten Seruyan	Nomor : 232 TAHUN 2011
10.	Kabupaten Murung Raya	Nomor : 188.45/412.a/ Tahun 2013
11.	Kabupaten Kapuas	Nomor : 562/BPPKB TAHUN 2014
12.	Kabupaten Lamandau	Nomor : 188.45/483/XI/HUK/2014
13.	Kabupaten Seruyan	Nomor : 232 TAHUN 2011
14.	Kabupaten Gunung Mas	Nomor : 364 TAHUN 2015
15.	Kabupaten Pulang Pisau	Sudah terbentuk namun belum ada SK Pembentukan

Dalam usaha menekan angka kekerasan dan meningkatkan pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah

juga telah terbentuk beberapa kesepakatan bersama sebagai berikut :

- Kesepakatan Bersama antara Ketua Tim Penggerak PKK dengan Kepala Badan Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 109/Skr/PKK Prov/XI/2014, Nomor : 479/Sekr-BP3AKKB/XI/2015 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah
- Kesepakatan Bersama antara Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota se Kalimantan Tengah dengan Kepala Badan Pemberayaan Perempuan dan Keluarga Berencana se Kalimantan Tengah tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 486/Sekr-BP3AKKB/XI/2014, Nomor : 460/2668/DINSOS.IV tentang Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan kasus pengaduan, penanganan kekerasan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Layanan terhadap korban tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 2.12
Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Bentuk Kekerasan	2012	2013	2014	2015
KDRT	63	151	130	60
Pelecehan Seksual	6	37	19	1
Bunuh Diri	1	6	3	0
Eksplorasi Seksual	0	4	0	1
Aborsi	0	1	0	2
Pencurian	0	8	16	0
Perzinahan	12	20	32	5
Perdagangan Perempuan	0	1	2	2
Perkosaan	4	19	15	0
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	7	8	14	2
JUMLAH	93	255	231	73

Tabel 2.13
Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk Kekerasan	2012	2013	2014	2015
Persetubuhan Terhadap Anak	26	111	75	26
Perbuatan Cabul Terhadap Anak	4	21	32	8
Perkosaan Terhadap Anak	5	19	14	1
Penganiayaan Terhadap Anak	1	31	38	18
Perbuatan Asusila Anak	7	2	4	1
Perdagangan Anak (Trafficking) /pencurian	2	2	10	2
Pornografi dan Pornoaksi	0	0	0	0
Bawa Lari Anak	3	8	14	2
Adopsi Anak	2	0	1	0
Perebutan Hak Asuh Anak	5	4	4	4
JUMLAH	55	198	192	62

4. Capaian Indikator Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.14
Daftar Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota dan Pemakaian Alat Kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Kabupaten / Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	
Kotawaringin Barat	48.505	1.015	758	140	1.044	3.175	19.174	19.174	44.480
Kotawaringin Timur	81.786	1.133	1.037	144	1.660	8.933	29.200	29.200	71.307
Kapuas	77.373	942	758	124	1.313	9.532	26.173	26.173	65.015
Barito Selatan	26.484	13	139	8	192	2.605	8.811	8.811	20.579
Barito Utara	25.255	244	90	32	280	1.410	8.536	8.536	19.128
Sukamara	35.704	271	86	16	1.242	3.115	13.829	13.829	32.388
Lamandau	24.452	1.079	51	18	828	3.020	8.234	8.234	21.464
Seruyan	15.713	1.011	21	1	99	5.71	7.194	7.194	16.091
Katingan	14.081	178	90	64	82	1.087	7.082	7.082	15.665
Pulang Pisau	25.700	69	15	5	522	2.504	11.331	11.331	25.777
Gunung Mas	16.162	711	361	30	971	1.281	6.280	6.280	15.914
Barito Timur	22.541	143	75	10	325	1.034	9.671	9.671	20.929
Murung Raya	17.938	241	187	4	188	1.086	5.995	5.995	13.696

Palangka Raya	51.967	3.715	477	22	1.404	2.008	19.613	19.613	46.852
Jumlah	483.661	10.765	4.145	618	10.150	41.361	181.123	181.123	429.285
2014	462.048	6.825	3.995	716	10.815	40.242	170.020	120.709	353.322
2013	407.823	7.838	4.184	641	10.405	37.598	167.208	127.622	355.496
2012	393.722	11.710	4.259	635	9.876	40.452	161.224	127.301	355.403
2011	429.953	7.105	3.768	529	9.008r)	31.327	142.569	129.788	324.094')
2010	...	7.327')	3.658')	489')	7.170')	33.310')	149.746')	133.759')	335.459')

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing

- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai

Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi capaian tahun ke -					Rasio capain pada tahun ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
11,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	*	*	*	1,87	1,89	1,92	1,94	1,96	7,19	8,31	9,14	8,49	8	384,49	439,68	476,04	437,63	408,16
11,2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	*	*	*	33,1	33,12	33,14	33,16	33,18	11,04	9,71	12,59	33,16	15,18	33,35	29,32	37,99	100,00	45,75
11,3	Rasio KDRT	*	*	*	0,0012	0,001	0,008	0,006	0,006	0,0054	0,0106	0,0066	0,0106	0,0306	450,00	1060,00	82,50	176,67	510,00
11,4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	*	*	*	0,55	0,53	0,51	0,49	0,49	0,56	0,58	*	*	0,11	101,82	109,43	#####	#####	22,45
11,5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	*	*	*	34,95	34,97	34,99	35,02	35,04	56,16	51,2	48,94	33,91	35,66	160,69	146,41	139,87	96,83	101,77
11,6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak	*	*	*	100	100	100	100	100	139	106	189	123	135	139,00	106,00	189,00	123,00	135,00
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																		
12,1	Rata-rata jumlah Anak per keluarga	*	*	*	0,76	0,73	0,7	0,7	0,7	1,06	1	1	0,8	1,1	139,47	136,99	142,86	114,29	157,14
12,2	Rasio Akseptor KB	*	*	*	22,75	22,77	22,79	22,81	22,82	79,28	74,69	77,15	76,47	78,19	348,48	328,02	338,53	335,25	342,64
12,3	Cakupan peserta KB aktif (orang)	*	*	*	313,859	345,241	379,765	384,547	353,322	394,460	355,421	384,547	353,322	376,606	125,68	102,95	101,26	91,88	106,59
12,4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	*	*	*	181,901	172,805	164,165	188,555	188,730	209,279	194,108	188,555	188,730	183,937	115,05	112,33	114,86	100,09	97,46

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indek Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum dapat digambarkan
- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level jika dibandingkan dengan laki-laki.
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

2. Peluang

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja
- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Analisis SWOT

Untuk menyusun strategi dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah maka diperlukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam penyusunan perencanaan.

1. Identifikasi

a. Identifikasi faktor – faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait

2) Kelemahan (*Weakness*)

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- *Reward and Punishment* belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal

- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

b. Identifikasi faktor – faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunities*)

- Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang susunan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Adanya dukungan dari legislatif dan mitra kerja
- Adanya organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta ketahanan keluarga
- Adanya koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta ketahanan keluarga

2) Ancaman (*Threats*)

- Belum efektifnya pola pembangunan partisipatif (pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat)
- Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan
- Adanya pengaruh globalisasi arus informasi

- Adanya perubahan budaya dan kearifan lokal menuju budaya modernisasi
- Pertumbuhan organisasi masyarakat yang tinggi tanpa adanya koordinasi secara intensif
- Pertumbuhan bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan politik yang tidak kondusif

Berdasarkan identifikasi diatas maka dirumuskan interaksi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pemetaan SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)

Faktor- faktor Internal Faktor-faktor Eksternal	(S) Strengths/Kekuatan	(W) Weaknesses/Kelemahan
(O) Opportunities/ Peluang	<p>STRATEGI SO : Mengembangkan suatu strategi dalam Memaksimalkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O)</p> <p>Memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan disetiap Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB</p> <p>Memaksimalkan peran Lembaga Masyarakat dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB</p>	<p>STRATEGI WO : Mengembangkan suatu strategi dalam Meminimalkan kelemahan (w) yang ada untuk menangkap peluang (o)</p> <p>Mengembangkan Strategi pencapaian pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melalui peningkatan kreativitas dan inovasi program dan kegiatan</p> <p>Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM Tingkatkan dan Optimalisasi data</p> <p>Pemutakhiran informasi dan data yang komprehensif serta informasi teknologi tepat guna</p>

Faktor- faktor Internal Faktor-faktor Eksternal	(S) Strengths/Kekuatan	(W) Weaknesses/Kelemahan
(T) Threats/Ancaman	<p>STRATEGI ST :</p> <p>Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)</p> <p>Memaksimalkan Sumber dana untuk alokasi Program dan kegiatan guna pencapaian indikator-indikator sasaran layanan</p> <p>Meningkatkan Penyuluhan, Sosialisasi, Advokasi, Koordinasi, Pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dan stakeholder pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB</p> <p>Meningkatkan dan membudayakan kearifan lokal untuk dapat menghadapi perubahan budaya</p>	<p>STRATEGI WT :</p> <p>Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).</p> <p>Mengoptimalkan pengembangan program/kegiatan</p> <p>Mengoptimalkan identifikasi data dan pengolahan data, serta pengelolaan data</p> <p>Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB</p>

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

a. Permasalahan Tugas dan Fungsi

- *Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2015 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat

2. Tenaga kerja perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang

3. Politik dan Pengambilan keputusan

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya jika dibandingkan dengan laki-laki.

4. Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan gender

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota

6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak

a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya

pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya

b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik

pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum

c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik

d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa

e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.

f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.

g. Masih tingginya angka drop-out sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak

di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal. Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.

- h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
- i. Belum semua kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
- j. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju KLA

7. Permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
- b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak
- c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat
- e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- ***Urusan Keluarga Berencana***

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Keluarga Berencana adalah belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah mengamanatkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini diharapkan semakin mendorong dan memperkuat BKKBD di Kabupaten/kota sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terlepas dari hal tersebut diatas, permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Metode fasilitasi dan mekanisme operasional dilapangan dalam pelaksanaan Program KB belum optimal
2. Sarana dan prasarana pelayanan operasional, pembinaan dan penggerakan masih kurang
3. Kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung program masih kurang
4. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP
5. Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun)
6. Belum semua Kabupaten/Kota menerima DAK Bidang KB

- **Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

- Koordinasi yang masih farsial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- belum optimalnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

3.2 **Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

A. Visi

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi sebagai berikut :

**" KALIMANTAN TENGAH MAJU, MANDIRI DAN ADIL
UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT
MENUJU KALIMANTAN TENGAH BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIOUS, KUAT
AMANAH DAN HARMONIS)."**

B. Misi

Berdasarkan Visi diatas, maka dapat dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam "Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, baik dalam taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Tengah secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentunya tidak terlepas dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses dan bidang pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah;
- 2) Penerapan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
- 3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender;
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), melalui
 - a) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
 - b) Penguatan mekanisme koordinasi antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
 - c) Penguatan lembaga/jejaring PUG di Pusat dan daerah termasuk Perguruan Tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai terkait dengan bidang layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. Meningkatnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

dengan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut :

- **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
-) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
-) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
-) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
-) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
-) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
-) Program Penyusunan Profil Lembaga

- **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 -) Program Keluarga Berencana
 -) Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
 -) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
 -) Program Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE
 -) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

3.3 **Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.4 Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang

menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut Tabel. :

Tabel 3.1

Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Tabel 3.2
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 	-----	-----

3.5 Telaahan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terdapat keterkaitan isu pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana yang berhubungan langsung atau bertentangan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

3.7 Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

- **Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - c. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
 - d. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

2. Perlindungan Anak :
 - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
 - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

- ***Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera***

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

BAB IV

VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun

4.1. Visi dan Misi

1. VISI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, Visi suatu organisasi akan memberi kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi. Mengacu pada hal tersebut, serta sejalan dengan tuntutan paradigma baru pembangunan dan harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah untuk meningkatkan Kapabilitas Kinerja yang konsisten serta berkelanjutan, maka Visi tidak hanya penting pada saat organisasi itu dibentuk tetapi juga pada tahap perkembangannya, dimana akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai tujuan yang ingin di capai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan VISI sebagai berikut :

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Penjelasan Makna Visi tersebut :

Makna dari visi tersebut diatas adalah bahwa sebagai salah satu SKPD yang ada di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter.

2. M I S I Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APP-KB pada 5(lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

2. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah *Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender*

yang ditandai dengan:

a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng

Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga

a. Persentase perempuan di lembaga legislatif

- b. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

yang ditandai dengan:

- a. Rasio kekerasan terhadap perempuan

Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

yang ditandai dengan:

- a. Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

yang ditandai dengan:

- a. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
- b. Rasio anak korban kekerasan

Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak

yang ditandai dengan:

- a. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:

Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

yang ditandai dengan:

- a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran

yang ditandai dengan:

- a. Hasil Penilaian SAKIP

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :

Menurunnya angka kelahiran

yang ditandai dengan:

- a. Angka kelahiran total per WUS
- b. Rata-rata jumlah anak per Keluarga

Meningkatnya akseptor KB

yang ditandai dengan:

- a. Persentase pemakaian kontrasepsi

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

yang ditandai dengan:

- a. Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta indikator kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut: :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng/ Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	Persen	0,86	1,71	2,14	2,57	3,00	3,43
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Jumlah perempuan di lembaga legislatif (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100	Persen	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Jumlah Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dibagi total pendapatan dikali 100	Persen	33,26	33,26	33,31	33,36	33,41	33,46
2.	Meningkatkan kualitas	Berkurangnya kasus	Rasio kekerasan terhadap	Jumlah perempuan korban kekerasan	Ratio	0,0306	0,0275	0,0244	0,0213	0,0182	0,0151

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	perlindungan hak perempuan	kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	perempuan	dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 1000							
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Jumlah kabupaten/kota Layak Anak dibagi Jumlah kabupaten/kota dikali 100	Persen	21,43	28,57	28,57	35,71	35,71	42,86
			Rasio anak korban kekerasan	Jumlah anak korban kekerasan dibagi Jumlah anak dikali 1000	Rasio	0,306	0,0275	0,0244	0,0213	0,182	0,0151
		Meningkatnya kualitas layanan	Persentase anak korban	Jumlah anak korban kekerasan yang	Persen	100	100	100	100	100	100

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		perlindungan khusus kepada anak	kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	dilayani sesuai standar dibagi jumlah anak korban kekerasan dikali 100							
4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dikali 100	Persentase	6,67	6,67	8,89	11,11	13,33	15,56
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Skor	B	B	B	B+	B+	B+
6.	Meningkatkan peran serta	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran	Total	2,36	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera			hidup laki2 dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi	Fertility Rate (TFR)						
			Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	Persen	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50
		Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama	Rasio	78,8	79,7	80,6	81,49	82,98	83,39
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak berKB (Unmet Need KB)	Persen	21,2	20,3	19,4	18,51	17,02	16,61

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menentukan beberapa prioritas yang akan dicapai melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta dukungan program/kegiatan, hal-hal yang menjadi fokus prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kebijakan-kebijakan dan aturan dibidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana
 - a. Regulasi tentang anggaran responsif gender (ARG) yang akan dicapai dengan tersusunnya Perda, Pergub, Kegub, Perwali, Perbup dalam rangka perwujudan PPRG dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang akan menjadi dasar pembentukan tim teknis ARG
 - b. Regulasi tentang pengarusutamaan gender bidang sosial, politik dan hukum, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan yang akan dicapai dengan tersusunnya Perda, Pergub, Kegub, Perwali, Perbup
 - c. Regulasi tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari di daerah yang akan dicapai dengan tersusunnya Perda, Pergub, Kegub, Perwali, Perbup
 - d. Regulasi tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai dengan tersusunnya Perda, Pergub, Kegub, Perwali, Perbup
 - e. Regulasi tentang Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai dengan tersusunnya Perda, Pergub, Kegub, Perwali, Perbup
 - f. Regulasi tentang gerakan sayang ibu di Provinsi Kalimantan Tengah
 - g. Kesepakatan bersama antara lembaga pelaksana kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka peningkatan layanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - h. Kesepakatan bersama antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka percepatan terbentuknya kabupaten/kota layak anak
 - i. Kesepakatan bersama antara lembaga pelaksana kebijakan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kualitas data dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Penguatan lembaga-lembaga dan jejaring pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Penguatan pokja PUG dan tim teknis ARG sebagai penggerak kebijakan dan strategi PPRG di lingkup Pemda dan SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/kota
4. Penguatan gugus tugas, pokja, pokjatap, satgas pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak, serta GSI
5. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas :
 - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS
 - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
 - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender di provinsi kalimantan tengah.
6. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
7. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
8. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak; bidang kesehatan melalui Puskesmas Ramah Anak; bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak; serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
9. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya
10. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

1.3 Strategi

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan strategi secara umum sebagai berikut :

1. Strategi Eksternal
 - a. Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
 - b. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan
 - c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemangku kepentingan di Pemda, dan Kabupaten/Kota, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana
 - d. Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan
 - e. Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta Keluarga Berencana .
2. Strategi Internal
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak
 - b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan kinerja pegawai
 - c. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah secara proposional dan akuntabel
 - d. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

- e. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan pegawai
- f. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
- g. Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar unit kerja.

1.4 Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk Tahun 2016 - 2020 antara lain :

1. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Arah kebijakan secara umum dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Lembaga di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota, serta Organisasi.

2. Perlindungan Perempuan

Arah kebijakan secara umum dalam bidang perlindungan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Lembaga di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Organisasi;
 - b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
 - d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota, serta Organisasi.
3. Perlindungan Anak

Arah kebijakan secara umum dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Lembaga di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Organisasi;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota, serta Organisasi.

4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Arah kebijakan secara umum bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada :

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai acuan bagi Lembaga di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Organisasi
- b. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota, serta Organisasi

Strategi dan kebijakan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah guna mencapai visi yang telah ditentukan, dengan menyesuaikan kepada tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

VISI : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI 1 : Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan				
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); · Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.

VISI : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI 2 : Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak				
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. · Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
3.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak; Meningkatkan pemahaman dan komitmen	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

VISI : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terhadap Anak		pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah; Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak; Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak; Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.	Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. · Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.

VISI : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA

VISI : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah				
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Meningkatkan kualitas kinerja	Penyelarasan program dan kegiatan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

VISI : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana				
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Meningkatkan pengetahuan menjadi keluarga berencana dan sejahtera pada masyarakat	Peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi/penyuluhan KB dan KS
		Meningkatnya akseptor KB	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana	Promosi dan sosialisasi manfaat ber-KB kepada Pasangan Usia Subur
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Meningkatkan kesadaran menggunakan alat kontrasepsi	Promosi dan sosialisasi manfaat menggunakan alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016 – 2021), meliputi : program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program pembangunan RPJMD Kalteng 2016 - 2021.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan berdasarkan pengelompokan program untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset/barang daerah
7. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
8. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
9. Program penyusunan profil lembaga
10. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
11. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
12. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
13. Program keluarga berencana
14. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
15. Program peningkatan penanggulangan narkoba, pms
16. Program keluarga berencana, advokasi dan kie
17. Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas

5.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja program dan kegiatan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1* Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Sasaran Strategis 1* Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender
- Indikator Sasaran* Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
- Sasaran Strategis2* Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
- Indikator Sasaran* -Persentase perempuan di lembaga legislatif
-Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
I	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya keserasian kebijakan Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)
		harmonisasi kebijakan PUG	Persentase Terlaksananya koordinasi
1	Rakor Pokja PUG dan tim teknis ARG tingkat Provinsi	Tersedianya dokumen percepatan analisis responsif gender di Provinsi	Jumlah Dokumen
2	Rakor Pokja PUG Kab./Kota seKalteng	Tersedianya dokumen percepatan analisis responsif gender di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen
3	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Tersedianya dokumen kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta terwujudnya kesamaan persepsi guna sinergitas di antara pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen
		Tersosialisasinya kebijakan PUG	Persentase terlaksananya sosialisasi
4	Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota	Terlaksananya Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota	Jumah Peserta
5	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Terlaksananya Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Jumlah peserta
6	Sosialisasi Kebijakan PUG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan PUG	Jumlah peserta
7	Sosialisasi Kebijakan ARG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan ARG	Jumlah peserta

		<i>Tersusunnya kebijakan PUG</i>	<i>Persentase tersusunnya kebijakan</i>
8	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen
		<i>Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kebijakan PUG</i>	<i>Persentase pelaksanaan monev</i>
9	Monev PUG di Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah	Jumlah Dokumen
II	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak di daerah	Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)
		<i>Pemanfaatan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan TOR dalam proses perencanaan dan penganggaran</i>	<i>Persentase pemanfaatan</i>
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Tersusunnya dokumen ARG perangkat daerah	jumlah dokumen
		<i>Pengembangan kapasitas SDM penggerak PUG di daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengembangan kapasitas</i>
2	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Jumlah peserta
3	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Terlaksananya TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Jumlah peserta
4	Pelatihan bagi tim teknis ARG	Terlaksananya Pelatihan bagi tim teknis ARG	Jumlah peserta
5	Pelatihan ARG Bagi Focal Point	Terlaksananya Pelatihan ARG Bagi Focal Point	Jumlah peserta
6	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Terlaksananya Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	jumlah dokumen
		<i>Aktifnya kelembagaan PUG di daerah</i>	<i>Persentase lembaga PUG aktif</i>
7	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Terlaksananya pemantauan dan koordinasi Jejaring Kelembagaan	jumlah dokumen
III	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)
		<i>Meningkatnya motivasi perempuan melalui pelaksanaan kegiatan partisipatif</i>	<i>Cakupan kegiatan</i>
1	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Meningkatnya kapasitas perempuan kader/penggerak pembangunan	Jumlah Peserta

2	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalteng	Terpilihnya Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalteng	Jumlah kegiatan
3	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Meningkatnya Pelaksanaan PUG melalui kegiatan di masyarakat	Jumlah Kegiatan
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan	Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)
4	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Keikutsertaan dalam Pameran dan pawai pembangunan	Jumlah kegiatan
		Meningkatnya persentase kader politik perempuan	Persentase kader politik perempuan
5	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kaukus
		Meningkatnya keterampilan, wawasan perempuan pelaku ekonomi dan keluarga	Cakupan kegiatan
6	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	Meningkatnya jumlah Perempuan yang memiliki keterampilan tepat guna Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta
7	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga	Terlatihnya Perempuan dalam memanfaatkan Limbah guna Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga	Jumlah peserta
8	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	Meningkatnya kapasitas Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	Jumlah Dokumen
9	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Meningkatnya jumlah UP2K yang memahami Akses Permodalan	Jumlah peserta
10	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Terlaksananya monev Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah dokumen monev
11	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Meningkatnya jumlah keluarga yang mendapatkan Bimbingan Manajemen Usaha	Jumlah peserta
12	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terlaksananya Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Dokumen
13	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	Meningkatnya Kelompok Usaha Perempuan	Jumlah Kelompok
14	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatnya akses dan informasi bagi perempuan dalam bidang pembangunan	Jumlah promosi
15	Capacity Building Bagi perempuan	Meningkatnya kapasitas perempuan kader/penggerak pembangunan	Jumlah Peserta

Tujuan 2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Sasaran Strategis 1	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Indikator Sasaran	Rasio kekerasan terhadap perempuan
Sasaran Strategis2	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Indikator Sasaran	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya keserasian kebijakan Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)
		Harmonisasi kebijakan Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Terlaksananya koordinasi
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Tersedianya dokumen rencana aksi tindak lanjut kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak di daerah	Jumlah Dokumen tindak lanjut rapat koordinasi
2	Rapat Koordinasi Forum PKHP	Tersedianya dokumen penyalarsan program kegiatan terkait peningkatan peran perempuan	Jumlah Dokumen
3	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Tersedianya dokumen tata kelola layanan P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng, serta meningkatnya peran para pengelola P2TP2A/Pokjatab PkdRT	Jumlah Dokumen
4	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	Tersedianya dokumen pemantapan layanan Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	Jumlah Dokumen
		Tersosialisasinya kebijakan Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase terlaksananya sosialisasi
5	Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	Jumlah peserta
6	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta
		Tersusunnya kebijakan Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase tersusunnya kebijakan
7	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen

8	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelaksanaan monev
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Dokumen
10	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	Terlaksananya Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	Jumlah Dokumen
II	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)
		Meningkatnya usaha pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan kegiatan
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Pengembangan organisasi dan lembaga layanan bagi perempuan	Jumlah Kegiatan
2	Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT	Tersusunnya Buku Panduan Pencegahan KdRT	Jumlah Eksamplar
3	Promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terlaksananya Promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan di masyarakat	Jumlah kegiatan
4	Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan	Meningkatnya Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Dokumen
5	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Terlaksananya pengembangan unit layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen
6	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Meningkatnya kapasitas SDM Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Jumlah peserta
7	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Tersedianya Jasa Operasional bagi Satgas PkdRT dalam penjangkauan kasus	Jumlah Kegiatan
8	Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal	Terlatihnya Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal	Jumlah Kader
9	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan	Meningkatnya jumlah perempuan yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Jumlah peserta

- Tujuan 3** Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Sasaran Strategis 1** Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak
- Indikator Sasaran** -Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
-Rasio anak korban kekerasan

Sasaran Strategis2 Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak

Indikator Sasaran Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
I	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya keserasian kebijakan Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)
		Harmonisasi kebijakan khusus anak	Persentase terlaksananya koordinasi
1	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA TingkatProvinsi	Tersedianya dokumen tindak lanjut upaya percepatan pengarusutamaan hak anak	Jumlah Dokumen
2	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Tersedianya dokumen rekomendasi forum anak Provinsi	Jumlah Dokumen
3	Rakornas Forum Anak Nasional	Tersedianya dokumen rekomendasi forum anak nasional	Jumlah Dokumen
4	Rakorda Forum Anak Daerah	Tersedianya dokumen rekomendasi forum anak di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen
		Tersosialisasinya kebijakan khusus anak	Persentase terlaksananya sosialisasi
5	Sosialisasi/Advokasi pengembangan PHA diKab./Kota se Kalimantan Tengah	Terlaksananya Sosialisasi/Advokasi pengembangan PHA diKab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumah Peserta
6	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Jumah Peserta
7	Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah peserta
		Tersusunnya kebijakan khusus anak	Persentase tersusunnya kebijakan
8	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Terlaksananya Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Jumlah Dokumen
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kebijakan khusus anak	Persentase pelaksanaan monev
9	Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah	Terlaksananya Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah	Jumlah Kabupaten/kota
II	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (%)
		Meningkatnya perlindungan anak melalui pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak	Cakupan kegiatan

1	Kegiatan Sunatan massal	Terlaksananya Sunatan massal	Jumlah Orang
2	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	Terlatihnya apartur dalam implementasi Penanganan kasus hukum anak	Jumlah peserta
3	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	Terlaksananya Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	Jumlah peserta
4	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Terbentuknya Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah Pokja
5	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi	Meningkatnya kapasitas anggota gugus tugas PHA dalam memanfaatkan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	Jumlah peserta

Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak

Indikator Sasaran Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
I	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya keserasian kebijakan Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)
		<i>Harmonisasi kebijakan data gender dan anak</i>	<i>Persentase terlaksananya koordinasi</i>
1	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Tersedianya dokumen penyelarasan data terpih gender dan anak	Jumlah Dokumen
II	Program Penyusunan Profil Lembaga	Meningkatnya sistem data gender dan anak	Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)
		<i>Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak yang tervalidasi</i>	<i>Persentase Pendataan</i>
1	Surveilen Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi	Tersedianya informasi Gender dan anak yang update	Jumlah Dokumen
2	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Terbentuk, terpelihara dan meningkatnya Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah aplikasi
4	Survailens Data Pemenuhan Hak Anak	Tersedianya Data pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen
5	Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen
		<i>Meningkatnya Informasi publik terkait data gender dan anak</i>	<i>Persentase pelaksanaan publikasi data</i>
6	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Tersusunnya Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen

7	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Tersusunnya Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen
8	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Publikasi dan Informasi mengenai program kegiatan PP PA Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Kegiatan
9	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Bermanfaatnya data terpilah gender dan anak sebagai sumber informasi mengenai gender dan anak serta sebagai data dasar evaluasi dan perencanaan Program kegiatan	Jumlah peserta

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran

Indikator Sasaran Hasil Penilaian SAKIP (skor)

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa Jaminan milik daerah	Tersedianya Jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Unit bangunan gedung yang diasuransi
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah bulan penyediaan biaya /jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa administrasi keuangan bagi aparatur
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa kebersihan kantor
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan biaya /jasa perbaikan peralatan kerja
8	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan biaya cetak dan penggandaan
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah bulan penyediaan komponen listrik kantor
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan

	undangan	undangan	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman bagi aparatur
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke luar daerah
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke dalam daerah
16	Rujukan Berobat PNS	Tersedianya jasa bantuan berobat aparatur	Jumlah pegawai penerima jasa berobat
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana penunjang kerja aparatur	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)
1	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	Jumlah paket pengadaan / unit
2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah paket pengadaan / unit
3	Pengadaan Meubelair	Tersedianya kebutuhan meubeler kantor	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah unit pemeliharaan
5	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman, taman dan tempat parkir	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman, taman dan tempat parkir	jumlah unit pemeliharaan
6	Pembangunan dan pengembangan Sistem informasi	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem informasi	Jumlah aplikasi
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediaanya pakaian dinas aparatur	Jumlah pakaian dinas / orang
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu / orang
3	Pengadaan pakaian olahraga	Tersedainya pakaian olahraga aparatur	Jumlah pakaian olahraga / orang
4	Pengadaan pakaian batik tradisional	Tersedianya pakaian batik tradisional bagi pegawai	Jumlah pakaian batik / orang
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sesuai dengan bidang kerja	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2	Rapat koordinasi perencanaan	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan	Jumlah rapat koordinasi perencanaan
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun

2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun
3	Penyusunan rka-SKPD	Tersunannya rka-SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun
4	Penyusunan renja SKPD	Tersunannya Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun
5	Penyusunan dokumen ARG SKPD	Tersusunnya dokumen ARG SKPD	jumlah dokumen ARG yang tersusun
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Meningkatnya pengelolaan aset dan barang milik daerah	Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)
1	Pengelolaan inventaris barang milik daerah	Terlaksananya pencatatan aset / barang milik daerah SKPD	jumlah dokumen aset / barang milik daerah

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran Strategis 1 Menurunnya angka kelahiran

Indikator Sasaran -Angka kelahiran total per WUS
-Rata-rata jumlah anak per Keluarga

Sasaran Strategis2 Meningkatnya akseptor KB

Indikator Sasaran Persentase pemakaian kontrasepsi

Sasaran Strategis3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Sasaran Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
I	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan di berbagai bidang pembangunan	Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)
		Partisipasi dan peran serta dalam kegiatan pembangunan keluarga dan masyarakat	Persentase peran serta dalam kegiatan (%)
1	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	Keikutsertaan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	Jumlah Kegiatan
II	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya layanan kependudukan dan pembinaan keluarga serta meningkatnya peran seta masyarakat dalam mendukung Program KB	Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)
		Meningkatnya ketersediaan informasi layanan KB melalui pelaksanaan kegiatan	Cakupan kegiatan

		<i>partisipatif</i>	
1	Pelayanan KIE	Tersedianya dokumen pelaksanaan KIE layanan KB	Jumlah Dokumen
2	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Meningkatnya jumlah masyarakat terutama PUS yang mengerti dan peduli akan pentingnya BerKB	Jumlah Peserta
3	Promosi Kepedulian KB	Terlaksananya Promosi Kepedulian KB	Jumlah Kegiatan
4	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Terlaksananya Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran	Jumlah Kegiatan
5	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah peserta
6	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta
		<i>Meningkatnya ketersediaan data kependudukan</i>	<i>Persentase Ketersediaan data</i>
7	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meakukan pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah Peserta
8	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen
9	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota	Tersedianya dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kab./Kota	Jumlah Dokumen
		<i>Tersedianya kebijakan daerah yang mengatur pengendalian kauntitas penduduk</i>	<i>Persentase penyusunan</i>
10	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen penyelarasan program dan kegiatan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen
11	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam melakukan sinkronisasi data Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Peserta
12	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya kapasitas Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan KB KS	Jumlah Peserta
13	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang relevan dengan	Jumlah Dokumen

		kondisi di daerah	
14	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Dokumen
		Meningkatnya kesertaan ber KB melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada kelompok bina keluarga	Persentase kesertaan masyarakat ber KB
15	Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga	Tersedianya kebijakan daerah yang mengatur tentang pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen
16	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasaran pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Jumlah unit
17	Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov.	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penguatan bagi anggota kelompok kegiatan Tk. Prov. (orang)	Jumlah orang
18	Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.	Meningkatnya promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov. (orang)	Jumlah orang
19	Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov.	Meningkatnya jumlah orang tua yang memahami pola pengasuhan anak (orang)	Jumlah orang
20	Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.	Meningkatnya jumlah remaja generasi berencana .(orang)	Jumlah orang
21	Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.	Meningkatnya akses PIK Remaja (orang)	Jumlah Lembaga
22	Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Meningkatnya kapasitas lembaga pelayanan keluarga sejahtera (orang)	Jumlah Lembaga
23	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Meningkatnya jumlah unit UPPKS yang berkembang (Unit)	Jumlah Unit
24	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Meningkatnya Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB (orang)	Jumlah orang
25	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan informasi dan pembinaan ketahanan keluarga (orang)	Jumlah orang
26	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga	Meningkatnya koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga (orang)	Jumlah orang
27	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Tersedianya dokumen pelaksanaan Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga (dokumen)	Jumlah doumen

28	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Meningkatnya jumlah unit sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga (Unit)	Jumlah unit
III	Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak	Meningkatnya cakupan kegiatan layanan kesehatan ibu, bayi dan anak	Cakupan layanan promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak (%)
1	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, anak melalui kegiatan di masyarakat	Meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya kesehatan ibu, bayi, anak	Jumlah peserta
2	Promosi Pencegahan Penyakit Reproduksi Perempuan	Meningkatnya Promosi Pencegahan Penyakit Reproduksi Perempuan	Jumlah kegiatan
3	Promosi Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Meningkatnya Promosi Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Jumlah kegiatan
IV	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)
		<i>Terlaksananya penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dan PMS</i>	<i>Persentase Pelaksanaan</i>
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah	Meningkatnya pemahaman peserta akan bahaya narkoba serta PMS	Jumlah peserta
V	Program Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE	Meningkatnya jumlah PUS berKB	Persentase PUS peserta keluarga berencana
		<i>Meningkatnya Kebijakan daerah dalam mendukung pelaksanaan KB dan Pembinaan Keluarga</i>	<i>Persentase</i>
1	Tersusunnya kebijakan dukungan program Kependudukan, KB dan Pembinaan Keluarga	Tersedianya dokumen kebijakan dukungan program Kependudukan, KB dan Pembinaan Keluarga	Jumlah dokumen
2	Tersusunnya kebijakan daerah tentang peran ormas dalam program KB	Tersedianya kebijakan daerah tentang peran ormas dalam program KB	Jumlah dokumen
		<i>Meningkatnya ketersediaan informasi/ materi pelaksanaan kebijakan Kependudukan, KB dan Pembinaan Keluarga</i>	<i>Persentase</i>
2	Tersusunnya materi Advokasi tentang KKBPK dengan muatan kearifan lokal (Jumlah Modul Materi)	Ttersedianya modul materi Advokasi tentang KKBPK dengan muatan kearifan lokal	Jumlah Modul
3	Tersusunnya materi KIE tentang KKBPK dengan muatan kearifan lokal (Jumlah Modul materi)	Ttersedianya modul materi KIE tentang KKBPK dengan muatan kearifan lokal	Jumlah Modul
4	Tersedianya dan Terdistribusinya materi	Meningkatnya ketersediaan materi Advokasi dan KIE di	Jumlah buku

	Advokasi dan KIE ke daerah Kab/Kota	daerah Kab/Kota (Jumlah Buku)	
5	Tersedianya sarana dan prasarana Advokasi dan KIE	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Advokasi dan KIE (Unit)	Jumlah Unit
6	Terlaksananya Promosi Program KKBPK melalui media massa dan elektronika	Meningkatnya promosi Program KKBPK	Jumlah kegiatan
		Meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan KB dan Pembinaan keluarga di daerah	Persentase pelaksanaan
7	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada Mitra Kerja	Meningkatnya Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada Mitra Kerja	Jumlah orang
8	Terlaksananya Advokasi dan KIE melalui kegiatan momentum	Meningkatnya Advokasi dan KIE kepada peserta kegiatan momentum	Jumlah orang
10	Terlaksananya kerjasama kemitraan pemangku kepentingan dalam program KB	Tersedianya dokumen kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam program KB	Jumlah dokumen
11	Terlaksananya kegiatan Advokasi dan KIE di Kampung KB	Meningkatnya pelaksanaan Advokasi dan KIE di Kampung KB	Jumlah desa/lokasi
12	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pembinaan kampung KB	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar kemitraan dalam pembinaan kampung KB	Jumlah orang
VI	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Menguatnya kelembagaan Keluarga Kecil	Cakupan penguatan Kelembagaan Kb di masyarakat(%)
1	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya kualitas SDM dalam keluarga melalui kegiatan pengembangan kapasitas keluarga	Jumlah Peserta

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

2. Unsur eksekutif, legislatif serta tim teknis anggaran daerah serta pemangku kepentingan di daerah provinsi Kalimantan Tengah
3. Stakeholder kebijakan bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB di provinsi Kalimantan Tengah
4. Unsur Perguruan Tinggi, Lembaga masyarakat, lembaga-lembaga Kajian/penelitian dan sekolah serta dunia usaha
5. Perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan dan mengalami diskriminasi dan tindak kekerasan
6. Organisasi dan tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Tokoh Perempuan dan Aparatur penegak Hukum
7. Kelompok masyarakat penerima layanan keluarga berencana

5.4 Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). sebagaimana dalam lampiran **Tabel 5.1**:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Targ et	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengaaurusutan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng					0,86		1,71		2,14		2,57		3		3,43		3,43			
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif					28,89		28,89		28,89		28,89		28,89		28,89		28,89			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga					33,26		33,26		33,31		33,36		33,41		33,46		33,46			
			2.02-2.2.01-01-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)	100	100	360	100	140	100	779	100	704	100	704	100	704	600	3.391	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-5.10	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	150	1	150	1	150	1	150	4	600	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-15.11	Rakor Pokja PUG Kab./Kota seKalteng	jumlah dokumen	1	1	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-15.17	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-15.8	Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	1	75	0	0	0	0	0	1	75	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-15.9	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Jumlah Peserta	1	1	210	1	140	1	210	1	210	1	210	6	1.190	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		
			2.02-2.2.01-01-15.33	Sosialisasi kebijakan PUG	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP-KB	Palangka Raya		
			2.02-2.2.01-01-15.34	Sosialisasi kebijakan ARG	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP-KB	Palangka Raya		
			2.02-2.2.01-01-15.37	Perumusan dan Penyusunan kebijakan daerah bidang PUG dan pemberdayaan perempuan	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	35	1	35	1	35	4	140	DP3APP-KB	Palangka Raya		
			2.02-2.0101-15.xx	Monev program PUG di daerah	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	4	336	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)	100	100	530	100	75	100	230	100	250	100	95	100	45	600	1.225	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-16.33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	jumlah dokumen ARG SKPD provinsi	0	0	0	33	50	46	50	46	50	46	0	217	200	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		
			2.02-2.2.01-01-16.34	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	jumlah peserta / jumlah SKPD	12	12	80	0	0	0	0	0	0	0	0	12	80	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		
			2.02-2.2.01-01-16.36	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Jumlah peserta	10	10	100	0	0	28	100	28	100	0	0	0	66	300	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-16.xx	Pelatihan bagi tim teknis ARG	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	20	35	56	100	56	0	56	0	188	135	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-16.51	Pelatihan ARG Bagi Focal Point	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	46	45	0	0	46	45	46	45	138	135	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-16.35	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	jumlah dokumen	1	1	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350	DP3APP-KB	Luar Kalteng	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-16.42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	jumlah dokumen	1	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	1	25	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)	100	100	0	100	100	100	95	100	45	100	95	100	95	600	430	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-17.27	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	1	50	0	0	1	50	1	50	3	150	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-17.28	Pemilihan Putra dan Putri Duta GenderProvinsi Kalteng	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	0	1	45	1	45	1	45	1	45	4	180	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-17.38	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Jumlah Kegiatan	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	1	100	DP3APP-KB	Palangka Raya	
			2.02-2.2.01-01-18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang Pembangunan (%)	100	100	569	100	250	100	1.532	100	1.569	100	1.449	100	1.449	600	6.818	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-18.7	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Jumlah Kegiatan	1	1	137	1	100	1	137	1	137	1	137	1	137	6	785	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.8	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kaukus	0	0	0	0	0	1	60	1	60	0	0	0	0	2	120	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-18.11	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	jumlah peserta	0	0	0	0	0	100	250	100	250	100	250	100	250	400	1.000	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.12	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga	jumlah peserta	0	0	0	0	0	50	60	50	60	0	0	0	0	100	120	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-18.13	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	60	1	60	1	60	1	60	4	240	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.14	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	jumlah peserta	0		0		0	40	60	40	60	40	60	40	60	160	240	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.15	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	jumlah dokumen	1	1	32	1	0	1	32	1	32	1	32	1	32	6	160	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.16	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	jumlah peserta	50	50	100	0	0	50	100	50	100	50	100	50	100	250	500	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-18.17	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	140	1	140	1	140	1	140	4	560	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.19	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	Jumlah Kelompok	10	10	300	10	150	10	300	10	300	10	300	10	300	60	1.650	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.25	Promosi peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Jumlah promosi	0	0	0	0	0	2	250	2	250	2	250	2	250	8	1.000	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.26	Capacity Building Bagi Perempuan	jumlah peserta	0	0	0	0	0	60	37,5	40	60	40	60	40	60	180	218	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-18.17	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	jumlah peserta	0	0	0	0	0	30	45	40	60	40	60	40	60	150	225	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan					0,306		0,0275		0,024		0,021		0,182		0,015		0,015	0		
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar					100		100		100		100		100		100		100	0		
			2.02-2.2.01-01-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)	100	100	776	100	800	100	1.164	100	1.589	100	1.164	100	1.164	600	6.657	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-15.5	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	jumlah dokumen	1	1	221	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1.221	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-15.12	Rapat Koordinasi Forum PKHP	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	75	0	0	0	0	1	75	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-15.15	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjabat PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Jumlah dokumen	0	0	0	1	50	1	0	1	0	1	0	1	0	5	50	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-15.30	Rapat Koordinasi Pokjabat Gerakan SayangIbu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	jumlah dokumen	1	1	170	1	0	1	170	1	170	1	170	1	170	6	850	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-15.14	Sosialisasi Pembentukan Pokjabat dan Satgas PkdRT se-Kalteng	Jumlah Peserta	30	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-15.35	Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	50	75	50	75	50	75	50	75	200	300	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.0101-15.32	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	jumlah dokumen	0	0	0	2	350	0	0	2	350	0	0	0	0	4	700	DP3APP-KB	luar Kalteng
			2.02-2.2.0101-15.38	Perumusan dan Penyusunan kebijakan daerah bidang perlindungan perempuan dan anak	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	350	1	350	1	350	1	350	4	1.400	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101-15.29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	jumlah dokumen	1	1	285	1	200	1	285	1	285	1	285	1	285	6	1.625	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.0101-15.41	Monev Program perlindungan perempuan dan anak didaerah	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	1	84	4	336	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)	100	100	1.455	100	1.100	100	1.597	100	1.597	100	1.497	100	1.447	600	8.693	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-17.26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Jumlah Kegiatan	1	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	6	2.400	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-17.30	Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT	jumlah Eksamplar	50	50	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	35	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-17.31	Sosialisasi Anti Kekerasan	Jumlah Kegiatan	1	1	61	1	50	0	0	0	0	0	0	0	2	111	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-17.42	Promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kegiatan	1	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-17.32	Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan	Jumlah Dokumen	0	0	0	1	0	1	50	1	50	1	50	1	0	5	150	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-17.33	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah Dokumen	1	1	482	1	500	1	482	1	482	1	482	1	482	6	2.910	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-17.35	Pelatihan/Magang Tenaga PendampingP2TP2 A se-Kab./Kota	Jumlah peserta	35	35	100	35	0	35	100	35	100		0		0	140	300	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-17.36	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Jumlah Kegiatan	80	80	27	80	50	80	27	80	27	80	27	80	27	480	185	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-17.37	Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal	Jumlah Kader	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	600	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-17.39	Deteksi Dini Kanker Cervix Bagi Perempuan	jumlah perempuan	200	200	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	250	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-17.40	Layanan kesehatan khusus perempuan	jumlah perempuan	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	1.200	1.200	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.0101-17.41	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0	2	48	2	48	2	48	2	48	8	192	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.0101-17.42	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0	4	40	4	40	4	40	4	40	16	160	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama					21,43		28,57		28,57		35,71		35,71		42,86		42,86	0		
		Rasio anak korban kekerasan					0,306		0,0275		0,024		0,021		0,182		0,015		0,015	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar					100		100		100		100		100		100		100	0		
			2.02-2.2.01 01-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)	100	100	635	100	565	100	769	100	769	100	694	100	694	600	4.126	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01 01-15.20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	jumlah dokumen	1	1	75	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	5	375	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01 01-15.24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	jumlah dokumen	1	1	200	1	275	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1.275	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01 01-15.25	Rakornas Forum Anak Nasional	jumlah dokumen	1	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	6	900	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-15.26	Rakorda Forum Anak Daerah	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-15.21	Sosialisasi/Advokasi pengembangan PHA diKab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah peserta (Kabupaten / Kota)	14	14	210	1	140	0	0	0	0	0	0	0	15	350	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-15.27	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	60	75	60	75	0	0	0	120	150	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-15.xx	Sosialisasi kebijakan daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	60	75	0	75	60	75	60	75	180	300	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-15.39	Perumusan dan Penyusunan kebijakan daerah tentang PHA	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	35	1	35	1	35	1	35	4	140	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.0101-15.42	Monev Pemenuhan hak anak (PHA) didaerah	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	1	84	4	336	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01 01 - 20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	persentase pelaksanaan kebijakan khusus anak di daerah	100	100	0	100	0	100	560	100	480	100	400	100	400	600	1.840	DP3APP -KB	
			2.02-2.2.01 01 - 20.8	Kegiatan Sunatan massal	jumlah anak	0	0	0	0	0	60	140	60	140	60	140	60	140	240	560	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01 01- 20.17	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	jumlah peserta	0	0	0	0	0	30	80	30	80	0	0	0	0	60	160	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01 01- 20.18	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	jumlah peserta	0	0	0	0	0	100	200	100	200	100	200	100	200	400	800	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01 01- 20.20	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	jumlah Pokja	0	0	0	0	0	1	80	0	0	0	0	0	0	1	80	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-16.21	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	15	60	15	60	15	60	15	60	60	240	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatkan kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak					6,67		6,67		8,89		11,11		13,33		15,56		15,56	0		
			2.02-2.2.01-01-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)	100	100	275	100	490	100	1.635	100	1.635	100	1.355	100	275	600	5.665	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-15.31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	jumlah dokumen	1	1	275	1	0	1	275	1	275	1	275	1	275	6	1.375	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-21	Program Penyusunan Profil Lembaga	Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)	100	100	175	100	245	100	680	100	680	100	540	100	540	600	2.860	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-21.7	Surveilen Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	45	1	45	1	45	4	180	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		
			2.02-2.2.01-01-21.9	Pegembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	jumlah aplikasi	0	0	0	0	0	1	45	1	45	0	0	0	2	90	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-21.10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	jumlah dokumen	0	0	0	1	170	1	170	1	170	1	170	5	850	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		
			2.02-2.2.01-01-21.11	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	50	1	50	0	0	0	2	100	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-21.12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Kegiatan	2	2	175	2	75	2	175	2	175	2	175	12	950	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.02-2.2.01-01-21.13	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	jumlah peserta	0	0	0	0	0	26	60	26	60	26	60	26	60	104	240	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-21.17	Surveilans Data Pemenuhan Hak Anak	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	45	1	45	1	45	1	45	4	180	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.02-2.2.01-01-21.18	Peningkatan Ketersediaan data gender dan anak	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	2	90	2	90	2	45	2	45	8	270	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Meningkatkannya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP					B		B		B		B+		B+		B+		B+	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
dan Keluarga Berencana			2.02-2.2.01-01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	1.505	100	1.456	100	1.328	100	1.288	100	1.298	100	1.358	600	8.233	DP3APP-KB	
			2.02-2.2.01-01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa surat menyurat	12	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	72	36	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	60	12	45	12	60	12	60	12	0	12	60	72	285	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.5	Penyediaan jasa Jaminan milik daerah	Jumlah Unit bangunan gedung yang diasuransi	0	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	1	5	4	20	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah bulan penyediaan biaya /jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	12	60	12	60	12	90	12	90	12	90	12	90	72	480	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa administrasi keuangan bagi aparatur	12	12	381	12	500	12	467	12	467	12	467	12	467	72	2.749	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa kebersihan kantor	12	12	140	12	150	12	150	12	150	12	150	12	150	72	890	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan biaya /jasa perbaikan peralatan kerja	12	12	25	12	15	12	25	12	25	12	25	12	25	72	140	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	12	60	12	60	12	60	12	60	12	60	12	60	72	360	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan biaya cetak dan penggandaan	12	12	80	12	40	12	80	12	80	12	80	12	80	72	440	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah bulan penyediaan komponen listrik kantor	12	12	15	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	72	65	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	75	0	0	1	120	1	80	1	150	1	150	5	575	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20	72	120	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01-01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman bagi aparat	12	12	35	12	35	12	35	12	35	12	35	12	35	72	210	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01-01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke luar daerah	12	12	215	12	200	12	80	12	80	12	80	12	80	72	735	DP3APP-KB	Luar Daerah
			2.02-2.2.01-01-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke dalam daerah	12	12	333	12	305	12	110	12	110	12	110	12	110	72	1.078	DP3APP-KB	Dalam Daerah
			2.02-2.2.01-01-1.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah pegawai penerima jasa berobat	0	0	0	2	10	2	10	2	10	2	10	10	50		DP3APP-KB	Luar Daerah	
			2.02-2.2.01-01-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	0	100	22	100	25	100	747	100	5097	100	247	100	247	600	6.385	DP3APP-KB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.0101-2.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	0	0	0	0	0	0	-	1	500	0	-	0	-	1	5.000	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101-2.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	-	0	-	1	500	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101-2.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	0	0	0	0	0	1	150	0	0	1	150	1	150	3	450	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah unit pemeliharaan	1	1	22	1	25	1	22	1	22	1	22	1	22	6	135	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101-2.xx	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman, taman dan tempat parkir	jumlah unit pemeliharaan	0	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	1	25	4	100	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101-2.xx	Pembangunan dan pengembangan Sistem informasi	Jumlah aplikasi	0	0	0	0	0	1	50	1	50,0	1	50,0	1	50,0	4	200	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.0101 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)	0	0	0	0	0	100	165	100	50	100	165	100	165	400	545	DP3APP -KB	
			2.02-2.2.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	0	0	0	0	0	75	75	75	0	75	75	75	75	300	225	DP3APP -KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	0	0	0	50	75	0	75	0	150	50	DP3APP -KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101 - 3.xx	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	0	0	0	0	0	75	45	75	0	75	45	75	45	300	135	DP3APP -KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.0101 - 3.xx	Pengadaan pakaian batik tradisional	Jumlah pakaian batik	0	0	0	0	0	75	45	75	0	75	45	75	45	300	135	DP3APP -KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ku alifikasi pada Unit Kerjanya	100	100	12	100	0	100	27	100	27	100	27	100	27	600	120	DP3APP -KB	
			2.02-2.2.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aaratur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	0	0	0	0	10	15	10	15	10	15	10	15	40	60	DP3APP -KB	Palangka Raya dan luar Kalteng
			2.02-2.2.0101 - 5.36	Rapat koordinasi perencanaan	Jumlah rapat koordinasi perencanaan	6	6	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	54	60	DP3APP -KB	Palangka Raya	
			2.02-2.2.0101 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)	100	100	80	100	80	100	95	100	95	100	95	100	95	600	540	DP3APP -KB	
			2.02-2.2.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	1	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	6	90	DP3APP -KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.02-2.2.01.01-6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	1	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	6	90	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01.01-6.6	Penyusunan rka-SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	6	150	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01.01-6.15	Penyusunan renja SKPD	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	1	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	6	150	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02-2.2.01.01-6.xx	Penyusunan dokumen ARG SKPD	jumlah dokumen ARG yang tersusun	0	0	0	0	0	1	15	1	15	1	15	1	15	4	60	DP3APP-KB	Palangka Raya
			2.02 - 2.2.01.01 - 8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	persentase pengelolaan aset dan barang milik daerah lingkup SKPD	100	100	22,65	100	22,65	100	22,65	100	22,65	100	22,65	100	22,65	600	136	DP3APP-KB	
			2.02 - 2.2.01.01 - 8.1	Pengelolaan inventaris barang daerah	jumlah dokumen aset / barang milik daerah	1	1	22,65	1	22,65	1	22,65	1	22,65	1	22,65	1	22,65	6	136	DP3APP-KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS					2,36		2,33		2,31		2,28		2,26		2,24		2,24			
		Rata-rata jumlah anak per keluarga					0,80		1,10		1,20		1,30		1,40		1,50		1,50			
	Meningkatnya akseptor KB	Presentase pemakaian kontrasepsi					78,8		79,7		80,6		81,49		82,98		83,39		83,39	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)			Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Presentase kebutuhan berkontras epsi yang tidak terpenuhi (unmet need)					21,2		20,3		19,4		18,5		17,0		16,6		16,6		0		
			2.02-2.2.01-01-18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan PUG di daerah	100	100	0	100	50	100	0	100	0	100	0	100	0	600	50	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.02-2.2.01-01-18.18	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	jumlah kegiatan	3	3	0	3	50	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15	Program Keluarga Berencana	persentase peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	100	100	72	100	200	100	1.637	100	1.637	100	1.637	100	1.637	600	6.821	DP3APP -KB	
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.2	Pelayanan KIE	jumlah dokumen	1	1	37	1	125	1	37,3	1	37,3	1	37,3	1	37,3	6	311	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.22	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta	0	0	0	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	500	375	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.24	Promosi Kepedulian KB	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.26	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	jumlah peserta	0	0	0	0	0	60	120	60	120	60	120	60	120	240	480	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.27	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	45	1	45	1	45	1	45	4	180	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.28	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan PerkiraanPengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah dokumen	1	1	35	0	0	1	35	1	35	1	35	1	35	5	175	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah, luarkalteng
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.31	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah peserta	0	0	0	0	0	30	75	30	75	30	75	30	75	120	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.33	peningkatan jejaring kelembagaan pelaksanaan kebijakan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	jumlah peserta	0	0	0	0	0	30	75	30	75	30	75	30	75	120	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.34	Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.35	monev pelaksanaan kebijakan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75	1	75	4	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.36	Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	jumlah peserta	0	0	0	0	0	30	75	30	75	30	75	30	75	120	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.37	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	jumlah peserta	0	0	0	0	0	30	75	30	75	30	75	30	75	120	300	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0	1	35	1	35	1	35	1	35	4	140	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Penyediaan sarana dan prasaran pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Jumlah unit	0	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov.	Jumlah orang	0	0	0	0	0	50	40	50	40	50	40	50	40	200	160	DP3APP -KB	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.	Jumlah orang	0	0		0		50	40	50	40	50	40	50	40	200	160	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov.	Jumlah orang	0	0		0		40	35	40	35	40	35	40	35	160	140	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.	Jumlah orang	0	0		0		40	30	40	30	40	30	40	30	160	120	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov. (orang)	Jumlah Lembaga	0	0		0		40	30	40	30	40	30	40	30	160	120	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Jumlah Lembaga	0	0		0		30	25	30	25	30	25	30	25	120	100	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Jumlah Unit	0	0		0	0	30	90	30	90	30	90	30	90	120	360	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Jumlah orang	0	0		0	0	40	35	40	35	40	35	40	35	160	140	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Jumlah orang	0	0		0	0	30	25	30	25	30	25	30	25	120	100	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga (orang)	Jumlah orang	0	0		0		30	40	30	40	30	40	30	40	120	160	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Jumlah orang	0	0	0	0	0	30	25	30	25	30	25	30	25	120	100	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 15.xx	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Jumlah unit	0	0	0	0	0	50	150	50	150	50	150	50	150	200	600	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			2.08 - 2.2.01 01 - 19	Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak	Cakupan layanan promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DP3APP -KB	
			2.08 - 2.2.01 01 - 19.1	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, anak melalui kegiatan di masyarakat	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.08 - 2.2.01 01 - 19.11	Promosi Pencegahan Penyakit Reproduksi Perempuan	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.08 - 2.2.01 01 - 19.12	Promosi Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			2.08 - 2.2.01 01 - 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS	Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)	0	0	0	0	0	100	310	0	310	0	310	0	310	100	1.240	DP3APP -KB	
			2.08 - 2.2.01 01 - 21.1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	400	310	400	310	400	310	400	310	1.600	1.240	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			30.01.2	Program Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE	Presentase PUS peserta keluarga berencana	0	0	0	0	0	0	0	98,94	900	98,95	910	98,95	920	297	2.730	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.2.01	Tersusunnya kebijakan dukungan program Kependudukan, KB dan Pembinaan Keluarga (Dokumen)	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.2.02	Tersusunnya materi Advokasi tentang KKBPK dengan muatan kearifan lokal (Jumlah Modul Materi)	Jumlah Modul Materi	0	0	0	0	0	0	0	2	40	2	40	2	40	6	120	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			30.01.2.03	Tersusunnya materi KIE tentang KKBP dengan muatan kearifan lokal (Jumlah Modul materi)	Jumlah Modul Materi	0	0	0	0	0	0	0	2	40	2	40	2	40	6	120	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.2.04	Tersedianya dan Terdistribusinya materi Advokasi dan KIE ke daerah Kab/Kota (Jumlah Buku)	Jumlah buku	0	0	0	0	0	0	500	150	500	150	500	150	1.500	450	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			30.01.2.05	Tersedianya sarana dan prasarana Advokasi dan KIE (Unit)	Jumlah Unit	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			30.01.2.06	Terlaksananya Promosi Program KBPK melalui media massa dan elektronika (Kegiatan)	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	2	20	3	30	4	40	9	90	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.2.07	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program KBPK kepada Mitra Kerja (orang)	Jumlah orang	0	0	0	0	0	0	30	25	30	25	30	25	90	75	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			30.01.2.08	Terlaksananya Advokasi dan KIE melalui kegiatan momentum (orang)	Jumlah orang	0	0	0	0	0	0	40	50	40	50	40	50	120	150	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah	
			30.01.2.09	Tersusunnya kebijakan daerah tentang peran ormas dalam program KB (dokumen)	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	DP3APP -KB	Provinsi Kalimantan Tengah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			30.01.2.10	Terlaksananya kerjasama kemitraan pemangku kepentingan dalam program KB (dokumen)	Jumlah dokumen	0	0	0	0		0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.2.11	Terlaksananya kegiatan Advokasi dan KIE di Kampung KB (Desa/lokasi)	Jumlah desa/lokasi	0	0	0	0	0	0	0	10	350	10	350	10	350	30	1.050	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.2.12	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pembinaan kampung KB (orang)	Jumlah orang	0	0	0	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)	Tar get	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			30.01.25	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Cakupan penguatan Kelembagaan KB di masyarakat(%)	100	100	0	100	0	100	80	100	80	100	80	100	80	600	320	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
			30.01.25.6	Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	100	80	100	80	100	80	100	80	400	320	DP3APP-KB	Provinsi Kalimantan Tengah
Total								6.4		5.5		13.4		18.8		12.7		11.6		68.8		
								89		99		52		25		85		75		25		

TABEL 5.2
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengausrutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	
3.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Rasio anak korban kekerasan	
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	
4.	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data Terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; Program Penyusunan Profil Lembaga.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah;
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Perlindungan penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Program keluarga berencana; Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak; Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS Program keluarga berencana (kb), advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (kie); Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
		Meningkatnya akseptor KB	Rata-rata jumlah anak per keluarga	
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase pemakaian kontrasepsi	
			Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi	

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam **Tabel 6.1** berikut

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,49	10,41	10,88	11,36	11,83	12,30	12,30
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,78	21,58	23,59	25,60	27,61	29,62	29,62
11.3	Rasio KDRT	0,0306	0,0244	0,0213	0,0182	0,0151	0,0120	0,0120
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,53	0,30	0,23	0,15	0,08	0,00	0,00
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,55	53,06	54,09	55,12	56,15	57,18	57,18
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100

11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,90*)	79,20	79,86	80,53	81,20	81,88	81,88
11.8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,33*)	89,99	90,33	90,66	91,0	91,34	91,34
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,80*)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50
12.2	Rasio akseptor KB	77,91	79,70	80,60	81,49	82,39	83,29	83,29
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	376.606	382.023	394.756	403.585	412.413	425.000	425.000
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	183.937	170.497	164.891	159.285	153.678	148.072	148.072

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2020 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Proiritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2020 tentunya akan diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

Dengan tersusunya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mewujudkan visi : **“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”** dengan memperhatikan dan mengacu pada misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.